



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMDA TERHADAP

PENERIMAAN PBB

DIAJUKAN OLEH :

NAMA : INDAH PRATIWI

NPM : 125100599

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2014

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa indikator yang dapat mengukur efektivitas pemungutan PBB terhadap penerimaan PBB. Beberapa indikator tersebut yaitu tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, peraturan daerah, aparatur PEMDA, dan lembaga kemasyarakatan sebagai variabel independen, sedangkan penerimaan PBB sebagai variabel dependen. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 100 responden di Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode tidak acak. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Data dianalisis dengan menggunakan *software SPSS* versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, peraturan daerah, dan aparatur PEMDA berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Sedangkan variabel lembaga kemasyarakatan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Variabel tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, peraturan daerah, aparatur PEMDA, dan lembaga kemasyarakatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB. Untuk meningkatkan penerimaan PBB disarankan untuk meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan sebagai lembaga yang paling dekat dalam suatu masyarakat, meningkatkan sosialisasi yang intensif mengenai PBB, serta meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan aparatur PEMDA.

The purpose of the study is to determine the effect of indicators that can measure the effectiveness of tax collection land and building to the reception of land and building taxes. Some of the indicators that educational level, income level, local regulations, local government officials, and social institutions as independent variables, while the reception of land and building taxes as the dependent variable. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents in Central Jakarta. This research used non-random sampling. The sampling used purposive sampling and the data were analyzed by using multiple linear regression analysis. Data were analyzed using SPSS software verison 21. The result of research showed that educational level, income level, local regulations, and local government officials have significant influence to the reception of land and building taxes, while social institutions has not significant influence to the reception of land and building taxes. Educational level, income level, local regulations, local government officials, and social institutions jointly have significant influence to the reception of land and building taxes . several efforts are recommended to improve reception of land and building taxes, such as by increasing the active role of community institutions as the institutions most closely in society, increasing the

intensive socialization about land and building taxes, and increasing the capacity and quality of service of local government officials.

Keywords: Educational Level, Income Level, Local Regulations, Local Government Officials, Social Institutions, the reception of land and building taxes.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, memberi dorongan, bimbingan, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya
2. Bapak Dr. Ngadiman, SH., M.si, Ak., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dalam memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sawidji Widiatmojo, SE., M.M., MBA., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Sri Wahyuni, SE., M.Si., Ak., selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

5. Segenap dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan sehingga memungkinkan tersusunnya skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku, Syamsir Simanjuntak, SH. dan Hotma Ida Rotua Butar-Butar, yang telah menjadi orang tua yang terbaik yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, dan dorongan moril serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
7. Kakakku (Octavia dan Novalia), Abangku (Deddy dan Haris), dan Adikku (Jenny, Andi, dan Josua) yang telah membantu, memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
8. Nurul Artika, Elva Sepalawati, Jessica Novia, dan Hendrik Sugianto yang telah memberikan dukungan, bantuan dan semangat.
9. Seluruh karyawan Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Johar Baru yang telah banyak membantu penulis dalam pencarian data melalui penyebaran kuesioner dan membantu penulis melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik isi, tata bahasa, dan penyusunan. Hal itu semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan guna meningkatkan mutu penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan dapat

menjadi acuan bagi penulis lain yang tertarik untuk mendalaminya di masa yang akan datang.

Jakarta, 29 Juni 2014

Penulis,

Indah Pratiwi

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Ruang Lingkup Masalah	4
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Teori dan Definisi Perpajakan	8
1.1 Definisi Pajak.....	8
1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
1.3 Jenis Pajak.....	10
1.4 Prinsip Pemungutan Pajak.....	10
2. Pajak Bumi dan Bangunan	11
2.1 Definisi PBB.....	11

2.2 Subjek Pajak PBB.....	12
2.3 Objek PBB.....	13
2.4 Tarif PBB.....	14
3. Kesadaran Wajib Pajak.....	15
3.1 Tingkat Pendidikan.....	15
3.2 Tingkat Penghasilan.....	16
4. Peranan Pemerintah	17
4.1 Peraturan Daerah.....	18
4.2 Aparatur PEMDA.....	19
5. Peranan Lembaga Kemasyarakatan.....	20
6. Efektivitas Pemungutan PBB	21
7. Hasil Penelitian Terdahulu	22
B. Kerangka Pemikiran	24
1. Identifikasi Variabel	25
2. Definisi Variabel	26
C. Perumusan Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian	28
B. Metode Penarikan Sampel.....	29
1. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	29
2. Operasionalisasi Variabel.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Pengolahan Data	33

1. Uji Statistik Deskriptif.....	34
2. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	34
2.1 Uji Validitas.....	34
2.2 Uji Reliabilitas.....	35
3. Uji Asumsi Klasik	35
3.1 Uji Multikolinearitas	35
3.2 Uji Heterokedastisitas	36
3.3 Uji Normalitas.....	36
E. Teknik Pengujian Hipotesis.....	37
1. Uji Regresi Linear Berganda	37
2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t).....	37
3. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	38
4. Uji Koefisien Korelasi (Uji r).....	38
5. Uji Koefisien Determinasi (Uji <i>Adjusted R²</i>)	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	40
B. Analisis dan Pembahasan	46
1. Statistik Deskriptif.....	46
2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	51
2.1 Uji Validitas	51
2.2 Uji Reliabilitas.....	57
3. Pengujian Asumsi Klasik	61
3.1 Uji Multikolinearitas	61

3.2	Uji Heteroskedastisitas	63
3.3	Uji Normalitas	64
4.	Pengujian Hipotesis	66
4.1	Uji Regresi Linear Berganda.....	66
4.2	Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	69
4.3	Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)	74
4.4	Uji Koefisien Korelasi (Uji r).....	75
4.5	Uji Koefisien Determinasi (Uji <i>Adjusted R²</i>)	76
5.	Pembahasan.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	30
Tabel 4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Penghasilan.....	45
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif berdasarkan Tingkat Penghasilan	48
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif berdasarkan Peraturan Daerah.....	48
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif berdasarkan Aparatur PEMDA	49
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif berdasarkan Lembaga Kemasyarakatan	50
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif berdasarkan Penerimaan PBB	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas berdasarkan Tingkat Penghasilan	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas berdasarkan Peraturan Daerah.....	54
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas berdasarkan Aparatur PEMDA.....	55
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas berdasarkan Lembaga Kemasyarakatan.....	56
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas berdasarkan Penerimaan PBB.....	56
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
Tabel 4.17 Hasil Uji Reliabilitas berdasarkan Tingkat Penghasilan.....	58
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas berdasarkan Peraturan Daerah.....	59

Tabel 4.19	Hasil Uji Reliabilitas berdasarkan Aparatur PEMDA.....	59
Tabel 4.20	Hasil Uji Reliabilitas berdasarkan Lembaga Kemasyarakatan.....	60
Tabel 4.21	Hasil Uji Reliabilitas berdasarkan Penerimaan PBB.....	60
Tabel 4.22	Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4.23	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	64
Tabel 4.24	Hasil Uji Normalitas.....	65
Tabel 4.25	Hasil Penghitungan Regresi Linear Berganda.....	67
Tabel 4.26	Hasil Uji t – Tingkat Pendidikan terhadap Penerimaan PBB.....	70
Tabel 4.27	Hasil Uji t – Tingkat Penghasilan terhadap Penerimaan PBB.....	71
Tabel 4.28	Hasil Uji t – Peraturan Daerah terhadap Penerimaan PBB.....	72
Tabel 4.29	Hasil Uji t – Aparatur PEMDA terhadap Penerimaan PBB.....	73
Tabel 4.30	Hasil Uji t – Lembaga Kemasyarakatan terhadap Penerimaan PBB.....	74
Tabel 4.31	Hasil Uji F – ANOVA.....	75
Tabel 4.32	Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Ganda ..	76

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Pie Chart berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Gambar 4.2 Pie Chart berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Gambar 4.3 Pie Chart berdasarkan Tingkat Penghasilan.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Identitas Responden
Lampiran 3	Jawaban Responden
Lampiran 4	Statistik Deskriptif Responden
Lampiran 5	Statistik Deskriptif Data
Lampiran 6	Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas
Lampiran 7	Output SPSS Uji Asumsi Klasik
Lampiran 8	Output SPSS Uji Analisis Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah mengalami perubahan dari Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut azas desentralisasi, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah tersebut, banyak perubahan yang terjadi di berbagai aspek yang ada seperti kewenangan, struktur, maupun sistem pelaksanaan pemerintahan. Dalam melaksanakan otonomi daerah, setiap kabupaten dan kota diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proposional, dimana pelimpahan tanggung jawab tersebut disertai oleh pengaturan dan pembagian sumber daya nasional sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan optimal apabila didukung oleh pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang sering disebut

dengan sumber pendapatan daerah. Pengertian pendapatan daerah itu sendiri adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana undang-undang tersebut telah menggantikan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

Salah satu sumber Dana Bagi Hasil yaitu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan ialah iuran yang dikenakan terhadap pemilik,

pemegang kekuasaan, penyewa, dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Dalam hal ini, pemerintah pusat yang mengatur segala kebijakan yang mengenai PBB dan hasil dari penerimaan PBB tersebut sebagian dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin majunya perkembangan dan semakin kompleksnya masalah perpajakan yang dihadapi pemerintah pusat, maka mulai awal tahun 2014 pemerintah pusat telah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala kebijakan mengenai PBB. Sebelum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, setiap daerah mulai melakukan proses peralihan mulai tahun 2011. Penyerahan kewenangan ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi keuangan yang dimiliki daerahnya, khususnya dalam sektor pajak daerah, serta untuk meningkatkan penerimaan PBB.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:24), “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”. Efektivitas pemungutan PBB dapat dilihat dari besarnya prosentase target yang dapat direalisasikan setiap tahunnya. Efektivitas tersebut tentunya dipengaruhi faktor intern yaitu peranan pemerintah dan lembaga kemasyarakatan (peranan RT/RW) dalam memungut dan mengelola PBB dan faktor ekstern yaitu keadaan masyarakat. Banyak hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutannya, seperti kurang efektifnya fungsi pengawasan sehingga

masih banyak ditemukannya rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) *double*, tingkat perkembangan intelektual (pendidikan) masyarakat, serta tingkat ekonomi masyarakat untuk membayar PBB.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menetapkan judul penelitian yaitu **“EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMDA TERHADAP PENERIMAAN PBB”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas dalam pemungutan PBB oleh Pemerintah Daerah seperti adanya fungsi pengawasan yang kurang sehingga masih terdapat rumah kosong, SPPT *double*, tingkat ekonomi masyarakat dan tingkat perkembangan intelektual masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki (data dan waktu) pada penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang harus dibatasi, yaitu:

1. Indikator- indikator yang dapat mengukur efektivitas pemungutan oleh Pemda yang menghasilkan tingkat realisasi penerimaan PBB terhadap target yang telah ditetapkan.
2. Tempat yang terbatas, yaitu penulis hanya akan mengadakan penelitian di Wilayah Jakarta Pusat.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan PBB.
2. Bagaimana peranan pemerintah mempengaruhi penerimaan PBB.
3. Bagaimana lembaga kemasyarakatan mempengaruhi penerimaan PBB.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan indikator apa saja yang dapat mengukur tingkat efektivitas pemungutan PBB
- b. Untuk mengetahui pengaruh indikator efektivitas tersebut terhadap pencapaian target penerimaan PBB

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bagi program prodi ekonomi akuntansi, dan dapat menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya

b. Bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah

Dari hasil penelitian ini bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah dapat dimanfaatkan sebagai masukan atas indikator-indikator yang dapat mempengaruhi pemungutan PBB oleh PEMDA terhadap penerimaan PBB.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media baik untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian mengenai PBB ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri. Dalam sistematika pembahasan ini, akan diuraikan mengenai gambaran masing-masing bab yang akan dibahas, berikut adalah penjelasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, dibahas mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat penjabaran teori-teori yang relevan dengan penelitian dan mendasari serta mendukung penelitian melalui tinjauan pustaka. Landasan teoritis yang digunakan sebagai tinjauan pustaka berisi tentang dasar perpajakan, kesadaran wajib pajak (tingkat pendidikan tingkat penghasilan), peranan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, efektivitas, dan hasil penelitian terdahulu

yang relevan. Selain landasan teori, terdapat kerangka pemikiran yang berisikan tentang definisi variabel, identifikasi variabel, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, dibahas mengenai pemilihan obyek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data serta teknik pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan yang terdiri dari statistik deskriptif, pengujian validitas dan reliabilitas, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan berguna dan dapat diimplementasikan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Lerbin R. 2007. *Riset Pemasaran. Teori & Praktik*. Jakarta: Ghalia Indo
- Astutik, Tenny Putri. 2012. *Efektivitas Pemungutan PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kadana, Haryanti, Kausar & Jonathan. 2011. *Pengaruh Karakteristik Penduduk & Sosialisasi Pemerintah Terhadap Kasadaran WP dalam Membayar PBB di Kelurahan Jatilangeh Kecamatan Candisari Kota Semarang*. Jurnal
- Kausar & Hasrat, Nurafinah. 2010. *Hubungan Kinerja Aparat dengan Peningkatan Penerimaan PBB di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Musa, Hendra. 2012. *Pengaruh Intensifikasi Pemungutan PBB & Kemampuan Aparat/Petugas Terhadap Penerimaan PBB*. Jurnal
- Najib, Debby Farihun. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*. Jurnal
- Ndraha, Talidizuhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*

Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB

Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Jogjakarta: Mediakom

Prof. Dr. Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 2 Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat

Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Aksara

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Supriyanto. 2013. *Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Mutu Pelayanan, & Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar PBB*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

Zain, Mohamad. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Pratiwi

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Bukit Damai Sentosa I Blok. A/2 No. 16,
Balikpapan, Kalimantan Timur

Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 29 April 1992

Agama : Kristen Protestan

Telepon : 085215868387

Riwayat Pendidikan

2010-2014 : Program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Tarumanagara – Jakarta

2007-2010 : SMA Negeri 5 Balikpapan, Kalimantan Timur

2004-2007 : SMP Negeri 1 Balikpapan, Kalimantan Timur

2001-2004 : SD Advent Balikpapan, Kalimantan Timur

1998-2001 : SD Kristen Kalam Kudus, Ujung Pandang

1997-1998 : Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus,
Ujung Pandang

Jakarta, Juli 2014

Penulis

Indah Pratiwi